

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan. Sebuah idiologi sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi yang cenderung lebih berperan. Sering manusia salah jalan dan melakukan tindakan diluar aturan yang berlaku demi mendapatkan ekonomi yang layak. Selain itu kecenderungan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup membuat semakin komplek dan beragam masalah dalam masyarakat, seperti kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan utama bangsa Indonesia sesuai pembukaan Undang- Undang Dasar RI 1945 alinea keempat yang berbunyi:

” ..... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia..... ”.

Pada dasarnya manusia sebagai salah satu modal yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan maka harus memiliki mental dan kehidupan yang mampu mendorong proses tersebut. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam rangka membina warga binaan (narapidana) diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana menjadi manusia yang diterima oleh hukum dan masyarakat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan. Sebuah idiologi sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi yang cenderung lebih berperan. Sering manusia salah jalan dan melakukan tindakan diluar aturan yang berlaku demi mendapatkan ekonomi yang layak. Selain itu kecenderungan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup membuat semakin komplek dan beragam masalah dalam masyarakat, seperti kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan utama bangsa Indonesia sesuai pembukaan Undang- Undang Dasar RI 1945 alinea keempat yang berbunyi:

” ..... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasarnegara Indonesia..... ”.

Pada dasarnya manusia sebagai salah satu modal yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan maka harus memiliki mental dan kehidupan yang mampu mendorong proses tersebut. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam rangka membina warga binaan (narapidana) diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana menjadi manusia yang diterima oleh hukum dan masyarakat.

Dewasa ini narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek melainkan menjadi subjek yang dihormati dan dihargai oleh sesamanya. Pada dasarnya yang harus diberantas ialah faktor penyebab tindak pidana, bukan pelaku tindak pidana. Pandangan ini menimbulkan atau memunculkan persepsi dan penghargaan terhadap hak-hak narapidana, yang selama ini tidak terlalu dihiraukan, di lain pihak masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan ataupun dengan sikap mampu menerima kembali mantan narapidana dalam lingkungan sosial. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) agar dapat berintegrasi normal di masyarakat, dapat menjadi anggota masyarakat sepenuhnya. Berintegrasi normal ialah pemulihan hubungan warga binaan dengan masyarakat, karena mereka melakukan tindak pidana, maka hal itu dianggap perbuatan yang tidak sesuai dan cenderung meresahkan masyarakat, kemudian masyarakat akan memberi *stigma* atau *label* jahat kepada pelaku tindak pidana tersebut<sup>1</sup>.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Seperti yang diutarakan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kapasitas Rutan saat ini idealnya dihuni 90.385 orang, akan tetapi terpaksa dihuni 132.372 orang. Minimnya kapasitas rutan, ketidak lengkapan fasilitas, buruknya pelayanan dan ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan terhadap narapidana. Pada situasi ini wanita adalah obyek yang paling rentan bahaya psikis dan fisik. Tercatat jumlah narapidana yang

---

<sup>1</sup> <http://www.depukumham.go.id/xdepkumhamweb/home.html>

meninggal sepanjang tahun 2010 mencapai 778 orang.<sup>2</sup> Secara global narapidana wanita mengambil porsi sebanyak 5% dari seluruh populasi narapidana, namun proporsi ini cenderung meningkat dengan cepat.

Pada dasarnya perlindungan hukum narapidana wanita dengan sistem permasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Secara kodrati ada hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian khusus terhadap narapidana wanita, oleh karena itu permasalahan yang muncul adalah bagaimana pembinaan hukum terhadap narapidana wanita, apalagi jika narapidana wanita yang memiliki tanggungan balita atau sedang dalam keadaan mengandung. Narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Tindak pidana yang dijalannya, bukan berarti hak-haknya dicabut, akan tetapi pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, selain itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi dan hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 Pasal (14).

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidanya adalah wanita maka ada beberapa

---

<sup>2</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 31/12/2010 diunduh tanggal 17 September 2013

hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana pria. Narapidana perempuan memiliki kodrat berbeda dengan narapidana pria yaitu , mensturasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa permasalahan yang menarik untuk diperhatikan yaitu, “bagaimanakah jika terpidana adalah seorang Ibu dari anak balita yang masih menyusui atau seorang wanita yang menjalani proses pidana dalam keadaan mengandung?”. Hal ini menimbulkan opini apakah Negara memperbolehkan terpidana wanita tersebut membawa anak balitanya untuk tinggal bersama di lembaga pemasyarakatan karena alasan masih menyusui dan apakah wanita yang menjalani proses pidana dalam keadaan mengandung tersebut dipastikan mendapatkan fasilitas untuk memeriksakan kandungan setiap bulan dan mendapatkan jaminan fasilitas melahirkan yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU kesehatan No.36 Tahun 2009 mengenai anak balita yang berhak mendapatkan ASI eksklusif dari Ibunya dan UU No.12 Tahun 1995 (14) mengenai narapidana berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.

Lembaga Permasayarakatan Wirogunan Yogyakarta mempunyai narapidana wanita dalam kondisi hamil 1 orang dan memiliki balita 1 orang. Berdasarkan hasil pengamatan , hak – hak dan kepentingan narapidana wanita masih di bilang dapat terpenuhi dengan baik. Adanya fasilitas kesehatan baik untuk narapidana wanita juga tersedia, selain itu tempat-tempat sebagai kegiatan sehari-hari, tempat

tidur atau kamar mandi juga tersedia, akan tetapi kurang layak untuk digunakan, mengingat kondisi yang jauh dari kata bersih. Selain adanya fasilitas yang diberikan di Lapas perlu adanya pembinaan moril kepada narapidana wanita khususnya yang memiliki tanggungan balita dan sedang mengandung. Sejauh ini pembinaan untuk kondisi ibu hamil atau yang memiliki tanggungan balita belum secara rutin dilakukan, akan tetapi dari fasilitas hanya jika narapidana membutuhkan misalkan jika kondisi sakit, gangguan kehamilan, dan jika balita yang dibawa sakit, dll, sedangkan untuk perlakuan khususnya belum sepenuhnya dijalankan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui mengenai pembinaan narapidana wanita. Khususnya kepada narapida wanita yang mempunyai anak balita dan narapida dalam kondisi mengandung. Adapun judul untuk penelitian ini adalah “Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mempunyai Anak Balita atau Dalam Keadaan Mengandung Di LP Wirogunan Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan narapidana Wanita yang mempunyai anak balita atau mengandung di LP Wirowinangun Yogyakarta?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita yang mempunyai anak balita atau mengandung dan upaya untuk mengatasi di LP Wirowinangun Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data tentang pembinaan narapidana Wanita yang sedang menjalani proses pidana dalam keadaan mempunyai anak balita atau mengandung Di LP Wirogunan Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita yang sedang menjalani proses pidana dalam keadaan mempunyai anak balita atau mengandung dan upaya untuk mengatasinya Di LP Wirogunan Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kontribusi yang diharapkan mampu memberi kontribusi bagi penelitian ini adalah:

#### **1. Peneliti**

Penelitian dapat menunjang wawasan dan pengetahuan peneliti , sebab bagaimanapun juga peneliti harus tahu dan menguasai hasil penelitian yang diteliti. Penelitian memberi pengalaman baru dan teori-teori baru yang belum tentu diperoleh dari meja perkuliahan terutama mengenai pemecahan masalah, proses sosialisasi dan lain-lain.

## 2. Lembaga Pendidikan

Penelitian diharapkan memberi sumbangan pemikiran khususnya bagi ilmu administrasi pembangunan. Sehingga bisa dijadikan alat masukan bila ada problem sejenis timbul.

## 3. Lembaga Permasyarakatan

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dalam masalah Pidana khususnya mengenai Narapidana dan kelangsungan hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## 4. Masyarakat

Memberi informasi guna memacu komitmen masyarakat agar ikut serta dalam proses resosialisasi nara pidana kembali ke masyarakat, dan sebagai alat pertimbangan saat ingin memakai produk sumber daya manusia dari

## **E. Keaslian Penelitian**

Penggalian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademis dan telah mempublikasikannya pada beberapa jurnal cetakan dan jurnal online (internet). Penelitian mengenai Pembinaan Narapidana Wanita yang Memiliki Tanggungan Balita atau Dalam Keadaan Mengandung belum ada yang meneliti. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan narapidana wanita sebagai berikut:



1. Penelitian yang dilakukan Bernadetha Noramita Yulita (2009) dengan **judul Pembinaan Narapidana Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates**. Adapun rumusan masalah apakah model pembinaan bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah pembinaan narapidana perempuan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates tersebut dapat mencegah atau tidak dapat mencegah terjadinya residivis (penjahat kambuhan) , dengan hasil penelitiannya adalah pembinaan narapidana perempuan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates sejauh ini berhasil mencegah terjadinya residivis atau penjahat kambuhan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates bahwa 10 tahun terakhir (tahun 1998-2008) belum ada residivis atau penjahat kambuhan.
2. Penelitian yang dilakukan Ni Wayan Armasanthi (2011) dengan judul **“Perlindungan hukum Narapidana wanita Dalam sistem pemasyarakatan”**. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai bahan hukum primer. Disamping itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, rancangan undang-undang, bahan dari internet, serta secara empiris dilakukan penelitian di lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Denpasar.

Selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundangundangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya disebutkannarapidana, tidak dibedakan antara laki-laki maupun wanita. Demikian pula dalam kenyataannya narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar belum diperlakukan secara memadai, sehingga ke depan diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus narapidana wanita serta penempatan arealnya harus dipisahkan dengan narapidana laki-laki. Seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan wanita di Semarang.

3. Penelitian yang dilakukan Mega Prihatini (2006) dengan judul **“Perananan lembaga pemasyarakatan dalam perspektif Kesatuan konsep sistem peradilan pidana (studi kasus Pembinaan anak pidana di lembaga pemasyarakatanAnak kutoarjo)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana dan mengetahui kebenaran akan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses peranan Lembaga pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana dalam pembinaan Anak Pidana adalah memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan

pemasyarakatan yang telah ditentukan. Sebagai wujud dari pelaksanaan peranannya, Lembaga Pemasyarakatan memberikan program pembinaan meliputi kegiatan belajar mengajar berupa kelompok belajar (kejar paket), pendidikan agama, pendidikan olahraga dan rekreasi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, perpustakaan dan upaya harmonisasi Anak Pidana dengan keluarga atau badan sosial. Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menyediakan unsur-unsur penunjang seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan makanan. Pembinaan Anak Pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terbukti telah berhasil mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dibuktikan dari prosentase Anak Pidana yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam kurun waktu 15 bulan ( Januari 2005 – Maret 2006) yang relatif rendah yaitu sebesar 12,8 %.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Pembinaan merupakan segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk memberi dan meningkatkan skill, pengetahuan, sikap mental dan dedikasi, sehingga mereka yang dibina dapat menjalankan dan memahami apa yang diberikan.
2. Narapidana berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.<sup>3</sup>

3. Wanita adalah perempuan dewasa : kaum, kaum putri (dewasa)
4. Anak Balita dalam kamus Bahasa Indonesia adalah anak dibawah usia lima (5) tahun.
5. Mengandung adalah hamil, bunting ; mengandung anak dalam perut ; bunting.  
Wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia didalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida I. seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida.
6. Kandungan adalah kantong peranakan didalam perut wanita, janin yang masih dalam perut wanita.
7. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang oleh data empiris. Dalam kaitannya dengan jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif karena beranjak dari adanya kesenjangan asas/norma hukum yang kabur dan kekosongan norma dalam pengaturan perlindungan hukum narapidana wanita sehingga batasan

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar. Harapan. Jakarta. 1994. Hlm.192

<sup>4</sup> UU Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995

Peraturan Perundang undangan tersebut menjadi samar. Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena meneliti ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana wanita, disamping itu penelitian ini ditunjang pula dengan penelitian hukum empiris.

## 2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*), pendekatan analisis (*Analytical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparatif approach*), pendekatan historis (*Historis approach*), pendekatan filsafat (*Philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*).<sup>6</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mengadakan

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 101.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2005. Hlm.93-137

inventarisasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di dalam Lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan memiliki tanggungan balita dan dalam kondisi mengandung.

*b) The analitical and conseptual approach.* Pendekatan analisis konsep yang konstektual antara peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum narapidana wanita berkaitan dengan memiliki tanggungan balita dan dalam kondisi mengandung dalam sistem pemasyarakatan.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenisnya yang normatif maka penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, cartatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden mengenai obyek yang diteliti yaitu pembinaan narapidana wanita yang memiliki tanggungan balita atau dalam keadaan mengandung. Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat , yaitu:

---

<sup>7</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm.118.

- a) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b) PP no.33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif
- c) Undang-undang Pasal 14 UU pemasyarakatan

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku (*text book*), artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum, sedangkan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku (*text book*), artikel, hasilhasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 2006. Hlm. 13.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber dan responden dengan tujuan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas terpimpin dengan mewawancarai narasumber dan responden melalui pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan melalui tanya jawab yang dilakukan secara bebas dan terkonsep dengan kebijaksanaan peneliti. Kemudian akan dilakukan pencatatan terhadap jawaban dari responden dalam proses tanya jawab dalam wawancara tersebut. Berikut profil narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1 Narasumber Penelitian

Pihak	Nama	Umur	Keterangan
LP Wirogunan Yogyakarta	Ibu Kurniasih	-	Pengawas warga binaan LP Wirogunan Yogyakarta
	Bapak Heru	-	Kepala warga binaan LP Wirogunan Yogyakarta
Narapidana	Sriwati	41	Belum vonis masih masa residivis tahanan, lama tahanan 10 bulan kondisi sedang megandung, kasus karena tindak pencurian, status perkara PN WNI 365.
	Tika Purwaningsih	21	Vonis NOI B2aw 23/13 dengan masa tahanan 1 tahun, kondisi sudah melahirkan didalam LAPAS, kasus dikarenakan tindak pencurian, status perkara PN WNI 365

##### b. Studi pustaka

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca,



membandingkan, dan memahami secara teliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan diteliti

## **5. Metode Analisis Data**

Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan teknik sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu uraian-uraian ditulis dengan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.
- b. Interpretatif, yaitu dengan cara menjelaskan penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik sekarang maupun diberlakukan dimasa mendatang. Metode interpretatif yang digunakan diantaranya adalah gramatical interpretatie yaitu penafsiran menurut arti kata dan sistematische interpretatie yaitu penafsiran dengan mencari penjelasan pasapasal dalam undang-undang.
- c. Evaluatif yaitu melakukan penilaian terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma dalam hukum primer maupun sekunder.